



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### 2.1. PENELITIAN TERDAHULU

Sebelum menjalankan penelitian, penulis hendak melihat pada sejumlah penelitian terdahulu, di antaranya penelitian pertama berjudul Analisis Wacana Reklamasi Teluk Jakarta (Studi Wacana Kritis Roger Fowler pada *Republika Online*) oleh Darmadi dari Fakultas Ilmu Komunikasi, Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat. Subjek penelitian yaitu teks berita bertagar Reklamasi Teluk Jakarta di media *Republika Online*. Kemudian tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana konstruksi media *online* *Republika* dalam pewacanaan reklamasi Teluk Jakarta sepanjang April 2016 menggunakan analisis wacana Roger Fowler. Selain itu, peneliti juga bertujuan untuk mengungkap dan menjelaskan konstruksi media *online* *Republika* dalam pewacanaan reklamasi Teluk Jakarta sepanjang April 2016 menggunakan analisis wacana Roger Fowler. Juga bagaimana ideologi media *online* *Republika* pada pewacanaan reklamasi Teluk Jakarta sepanjang April 2016 menggunakan analisis wacana Roger Fowler.

Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan bersifat deskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Analisis Wacana Kritis Roger Fowler. Fowler dan kawan-kawan memandang bahasa sebagai satu set kategori dan proses, termasuk penggunaan hubungan antara obyek dan peristiwa. Model Fowler terbagi dalam dua kategori yaitu sintagmatik dan transformasi. Model sintagmatik terbangun dari tiga sub

model yaitu model transitif, intrasitid (ekuatif dan atributif), dan relasional. Adapun model transformasi berupa pasivasi (dari aktif ke pasif) dan nominalisasi (pembendaan).

Dalam menggunakan analisis wacana Fowler dan kawan-kawan, bahasa yang dipakai media bukanlah sesuatu yang netral, tetapi mempunyai aspek atau nilai ideologis tertentu. Permasalahan pentingnya di sini adalah bagaimana realitas itu dibahasakan oleh media. Teks dalam surat kabar, kalau hendak dianalisis memakai kerangka Fowler dkk, yang menjadi titik perhatian adalah pada praktik pemakaian bahasa yang digunakan. Ada dua hal yang bisa diperhatikan. Pertama, pada level kata, yakni bagaimana peristiwa dan aktor-aktor yang terlibat dalam peristiwa itu dibahasakan. Kedua, pada level susunan kata atau kalimat, yaitu bagaimana kata-kata disusun ke dalam bentuk kalimat tertentu dimengerti dan dipahami bukan semata sebagai persoalan teknis kebahasaan, tetapi praktik bahasa.

Arah alur penelitian ini merujuk pada model analisis wacana Roger Fowler dalam membedah teks media (wacana reklamasi Teluk Jakarta April 2016). Selain itu, penelitian ini membawa kita kepada pola yang memengaruhi sebuah pemberitaan media, yaitu ideologi media, tergambar melalui kosa kata dan struktur bahasa yang digunakan dalam pemberitaan.

Penelitian kedua berjudul Analisis Wacana Kritis Tentang Isu Reklamasi Teluk Benoa dalam Website Bali.Tribunnews.com oleh I Gusti Ngurah Agung Bayu P, Catur Nugroho, dan Dedi Kurnia Syah Putra, Universitas Telkom, Bandung, Jawa Barat. Subjek penelitian pemberitaan reklamasi teluk benoa di website bali.tribunnews.com. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui wacana tentang reklamasi Teluk

Benoa terkait dengan aspek ekonomi dalam website bali.tribunnews.com. Peneliti juga bertujuan untuk mengetahui wacana tentang reklamasi Teluk Benoa terkait dengan aspek politik dalam website bali.tribunnews.com.

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif dan deskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Analisis Wacana Kritis Theo Van Leeuwe. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi teks dan dokumentasi. Data diperoleh dari penelusuran berita pada website bali.tribunnews.com yang ada kaitannya dengan reklamasi Teluk Benoa serta dari beberapa sumber pendukung lainnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberitaan mengenai masalah reklamasi Teluk Benoa dan belum terjamin objektivitas dan netralitasnya atau ada unsur kepentingan suatu pihak dalam menjelaskan fakta tersebut. Media bali.tribunnews.com dalam pemberitaan mengenai reklamasi Teluk Benoa masih ditemukan ada penggambaran aktor sosial atau pihak-pihak terkait yang direpresentasikan secara baik dan ada juga pihak yang digambarkan secara buruk. Keterkaitan dengan aspek ekonomi politik untuk kepentingan satu pihak atau kelompok tertentu yang dapat dilihat pada analisis teks berita tersebut yaitu dalam konteks aspek ekonomi politik antara pemerintah, investor dan masyarakat yang menjadi penolakan masyarakat terhadap rencana pemerintah serta aspek ekonomi politik juga yang menjadi inti permasalahan di dalam berita website bali.tribunnews.com.

Penelitian ketiga, berjudul Media Di Antara Konflik Masyarakat Versus Tambang (Wacana Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemberitaan Pembangunan Pabrik PT Semen Indonesia Di Rembang Pada Desk Lokal Suara Muria Harian Suara

Merdeka) oleh Ghina Ghaliya Qudus, Universitas Multimedia Nusantara, Serpong, Tangerang. Subjek penelitian ini adalah pemberitaan pada desk lokal Suara Muria Harian Suara Merdeka. Tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana wacana pemberdayaan masyarakat Rembang digambarkan dalam pemberitaan pembangunan pabrik PT Semen Indonesia di desk lokal Suara Muria yang merupakan edisi lokal daerah Muria dari Harian Suara Merdeka.

Jenis penelitian yaitu kualitatif dan bersifat deskriptif. Paradigma dari penelitian ini adalah kritis. Peneliti menggunakan metodologi penelitian Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough. Kesimpulan dari hasil penelitian ini, peneliti mengungkap bagaimana wacana pemberdayaan masyarakat Rembang dilanggengkan dalam pemberitaan pembangunan pabrik PT Semen Indonesia di desk lokal Suara Muria yang merupakan edisi lokal daerah Muria dari harian Suara Merdeka. Selain itu, peneliti menilai bahwa wacana pemberdayaan masyarakat yang dibungkus dengan paradigma eco-developmentalism merupakan wacana yang mendominasi pemberitaan mengenai pro dan kontra pembangunan pabrik PT Semen Indonesia di Rembang. Persoalan investasi dan kemajuan perekonomian dianggap menjadi agenda yang penting ketimbang keresahan warga kontra pabrik semen yang memandang persoalan dampak lingkungan.

U N I V E R S I T A S  
M U L T I M E D I A  
N U S A N T A R A

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

Nama Penulis	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Universitas	Fakultas
Darmadi	Analisis Wacana Reklamasi Teluk Jakarta (Studi Wacana Kritis Roger Fowler pada <i>Republika Online</i> )	Mengungkap dan menjelaskan konstruksi media <i>online</i> <i>Republika</i> dalam pewacanaan reklamasi Teluk Jakarta sepanjang April 2016 menggunakan analisis wacana Roger Fowler. Juga bagaimana ideologi media <i>online</i> <i>Republika</i> pada pewacanaan reklamasi Teluk Jakarta sepanjang April 2016 menggunakan analisis wacana Roger Fowler.	Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat	Ilmu Komunikasi
I Gusti Ngurah Agung Bayu P, Catur Nugroho, dan Dedi Kurnia Syah Putra	Analisis Wacana Kritis Tentang Isu Reklamasi Teluk Benoa dalam Website Bali.Tribunnews.com	Mengetahui wacana tentang reklamasi Teluk Benoa terkait dengan aspek ekonomi dalam website bali.tribunnews.com. Peneliti juga bertujuan untuk mengetahui wacana tentang reklamasi Teluk Benoa terkait dengan aspek politik dalam website bali.tribunnews.com	Universitas Telkom	Ilmu Komunikasi

		m.		
Ghina Ghaliya Qudus	Media Di Antara Konflik Masyarakat Versus Tambang (Wacana Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemberitaan Pembangunan Pabrik PT Semen Indonesia Di Rembang Pada Desk Lokal Suara Muria Harian Suara Merdeka)	Bagaimana wacana pemberdayaan masyarakat Rembang digambarkan dalam pemberitaan pembangunan pabrik PT Semen Indonesia di desk lokal Suara Muria yang merupakan edisi lokal daerah Muria dari Harian Suara Merdeka.	Universitas Multimedia Nusantara	Ilmu Komunikasi

## 2.2. TEORI DAN KONSEP

### 2.2.1. Environmentalisme

Sebelum adanya Environmentalisme, Libby Lester (2010, h. 17), menjelaskan studi environmental—studi yang membahas tentang alam, lingkungan hidup, dan manusia—sendiri baru berjalan sejak tahun 1962, ketika Rachel Carson menerbitkan buku berjudul “*Silent Spring*”, yang menceritakan tentang adanya satu kesatuan antara aktivitas manusia dengan alam dan teknologi. Carson menulis di dalam bukunya, “*tidak ada kekuatan, tidak ada musuh yang*

diam-diam mencoba untuk membangun dunia baru di dunia yang sudah bermasalah ini.” Carson juga menuliskan bahwa segala sesuatu perubahan signifikan yang terjadi di dunia ini merupakan ulah dari manusia itu sendiri.

Lowe dan Goyder menggambarkan (1983, dalam Lester, 2010, h. 17), environmentalisme di United Kingdom ketika usai perang dunia ketika kebijakan publik berubah menjadi modernisasi dan urbanisasi dalam jangka waktu yang singkat, seperti adanya kejadian polusi pada tahun 1960.

Tidak hanya dibahas di dalam buku tersebut saja, ternyata isu-isu environmental lainnya juga mulai diangkat di media-media mainstream, seperti koran lokal dan program televisi (Lester, 2010, h. 17).

Lester (2010, h. 29) menjelaskan, *The New York Times* memulai pertama kali pemberitaan terkait environmental pada pertengahan tahun 1969. Sejak saat itu, hampir seluruh media sadar bahwa isu environmental merupakan isu penting bagi peradaban manusia karena itu adalah masalah sosial dan isu yang harus diberitakan di media.

Berdasarkan studi environmental dan banyaknya isu lingkungan hidup, ini melahirkan Environmentalisme. Environmentalisme didefinisikan oleh O’Riordan sebagai kondisi atau keadaan alam atau lingkungan sebagai pengaruh terbesar terhadap modus perilaku pada seperangkat kebijakan. Environmentalisme Bisa juga dikatakan sebagai sebuah manifestasi kecil yang berlandaskan nilai-nilai. Environmentalisme juga dijelaskan, mengajarkan filsafat tentang perilaku



manusia yang masih banyak menemukan kesulitan untuk memahami dan orang-orang yang sadar menemukan pencapaian (Milton, 1993, h. 2).

Menurut Kay Milton (1993, h. 2), Environmentalisme merupakan sebuah komitmen sosial, yang memiliki esensi penting; yakni upaya pertanggungjawaban dan pencarian masa depan yang layak terhadap lingkungan dan budaya serta sosial di masyarakat. Esensi ini yang melahirkan gerakan Environmentalisme dalam menghadapi berbagai persoalan lingkungan hidup. Gerakan Environmentalisme di dalam persoalan Reklamasi Teluk Jakarta sendiri bisa diartikan sebagai aksi naluriah yang berasal dari kekhawatiran serta keyakinan datang dari kelompok yang lemah, kemudian menjadi sebuah ideologi kelompok besar (general).

Menurut Jeffrey E. Foss (2009, h. 8), Environmentalisme itu bukan sebuah sistem berpikir, tapi sebuah kumpulan dugaan fakta-fakta, pernyataan-pertanyaan akan kepercayaan, dan panggilan naluriah untuk bergerak—entah dengan cara atau perencanaan seperti apa.

Menurut Foss (2009, h. 8), mengapa bisa diartikan seperti itu, karena Environmentalisme itu mengandung banyak hak-hak yang harus diperhatikan, yaitu lewat analisa dan evaluasi demi mendapatkan kebenaran yang hakiki dan tak terelakan dari realitas sebenarnya.

Environmentalisme bisa datang dari berbagai jenis media dan *channels*. Environmentalisme dikenal publik lewat banyak *channels*; lewat laporan pers (berita-berita di koran atau daring) dan dokumentasi di televisi; lewat pernyataan

kebijakan pemerintah; lewat iklan komersial dan aksi sosial (Hannerz, 1992, di dalam Milton, 1993, h. 2).

Jeffrey E. Foss (2009, h. 11) menjelaskan, Environmentalisme sendiri berkaca dari pemberitaan di televisi, koran, atau daring, dan berusaha untuk mengkritik tentang kelompok dominan, yakni kelompok yang memiliki kepentingan bisnis. Kelompok bisnis di sini dideskripsikan mereka yang bersikap serakah dan tak memedulikan bahkan merusak lingkungan hidup demi kelancaran kepentingannya.

Menurut Jeffrey E. Foss (2009, h. 11-12), lahirnya ideologi atau pemikiran Environmentalisme di publik itu bisa dilihat dari tahap-tahapan berikut.

1. Tahap pertama, lingkungan atau alam dipandang sebagai “teman” dan “musuh” secara bersamaan. Alam atau lingkungan diandaikan sebagai tempat berjuang bersama dengan organisme lainnya yang berada di satu tempat yang sama. Keindahan alam atau lingkungan juga menjadi faktor utama mengapa itu menjadi “teman” bagi manusia. Maka dari itu, alam atau lingkungan bisa sangat dicintai atau dibenci oleh manusia. Pada tahap ini, Environmentalisme belum terlahir.
2. Tahap kedua ini, manusia memandang agrikultural, keindustrian, dan profesi lain yang menghancurkan dan menghasilkan banyak polusi, lalu alam atau lingkungan malah berbalik sebagai sesuatu yang

menyakiti manusia. Padahal jika diperhatikan seksama, kekacauan alam dan lingkungan disebabkan oleh manusia itu sendiri. Berasal dari pemikiran seperti itu, pada tahap ini, manusia dirasa bertanggungjawab atas segala kekacauan yang terjadi. Hal ini yang membuat orang-orang (environmentalis) mulai melihat kelompok dominan yang serakah dan tak peduli akan alam harus bertanggungjawab. Di tahap kedua ini, prioritas alam dan lingkungan berada di atas manusia.

3. Tahap ketiga, menjadi tahap di mana menyatukan kesimpulan dari dua tahap sebelumnya, yakni alam dan lingkungan bukan lagi “musuh”, tapi sebagai “partner” hidup selaras bersama kita. Alam dan lingkungan berjuang melawan berbagai kekacauan (yang ditimbulkan oleh manusia) selama berabad-abad lamanya. Hal ini yang membuat manusia sadar bahwa alam dan lingkungan bukan lagi “musuh” di tempat yang sama untuk berjuang, bertahan hidup. Pada tahap ini, manusia mulai membuat kesepakatan dengan alam dan lingkungan untuk hidup bersama. Bukan alam dan lingkungan dalam skala kecil, tapi secara keseluruhan.

U N I V E R S I T A S  
M U L T I M E D I A  
N U S A N T A R A

### 2.2.2. Environmental Journalism

Jurnalisme diartikan sebagai bagian terpenting dalam mengatur dan membangun isu-isu penting terkait dengan konflik sosial dan lingkungan. Isu perubahan iklim/ lingkungan, bukanlah hal mudah untuk dikerjakan oleh seorang jurnalis. Kenyataannya, isu lingkungan hidup juga mampu membuat batasan terhadap sebuah sistem editorial di jurnalistik sendiri, seperti adanya aspek politik, bisnis, teknologi, alam, budaya, dan permasalahan konsumen (Bodker dan Neverla, 2012, h. 152).

Namun pada akhirnya sejak perubahan iklim menjadi suatu ancaman, pertanyaan-pertanyaan bermunculan, mempertanyakan apakah dikotonomi yang masih tradisional seperti cara bekerja “objektif” dan “imbang” versus “advokasi” jurnalistik, menjadi sebuah tantangan sosial dan lingkungan (Bodker dan Neverla, 2012, h. 152).

Dengan adanya pertanyaan-pertanyaan tersebut (Bodker dan Neverla, 2012, h. 152), terjadi peningkatan terhadap perilaku media yang mulai membuat karya jurnalistik dengan isu perubahan iklim/ lingkungan. Hal tersebut juga mengakibatkan adanya pembelajaran baru di ilmu komunikasi dan media, khusus membahas isu-isu sosial dan lingkungan.

Pada sistem sosial sendiri memiliki transformasi ragam isu di jurnalisme yang berasal dari pemberitaan headline kemudian menjadi sebuah bahan perdebatan publik (Bodker dan Neverla, 2012, h. 153). Misalnya, transformasi sebuah pemberitaan politik menjadi sebuah konsep framing dan dibandingkan dengan suatu adat budaya tertentu. Hal itu bisa tercapai jika adanya data secara ilmiah, kemudian bisa dikatakan sudah memiliki perspektif yang “imbang”. Selain itu, isu yang diperdebatkan, menurut Boykoff dan Boykoff (2004, di dalam Bodker dan Neverla, 2012, h. 153) dipandang menjadi sebuah headline atau suatu kejadian besar (castratrophic).

Penjelasan di atas menggambarkan bagaimana jurnalisme terkait dengan ragam isu dan konflik. Oleh karena itu, jurnalisme juga bisa terkait dengan isu perubahan iklim/ lingkungan. Meski begitu, terkait dengan ragam isu, jurnalisme berfokus pada konten yang sudah melalui sebuah pemilahan tertentu, seperti agenda setting dan sebuah analisis.

Walaupun melalui suatu proses pemilahan tertentu, jurnalisme lingkungan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap adanya konsekuensi komunikasi jika berkaitan dengan konflik perubahan lingkungan, terutama tentang sikap yang timbul terhadap lingkungan hidup di kehidupan sehari-hari, seperti melihat ketidakberesan pada perubahan lingkungan menjadi gangguan tersendiri dan ada untuk diselesaikan (Bodker dan Neverla, 2012, h. 153-154).

### 2.2.3. Reklamasi

Kamus Besar Bahasa Indonesia daring (2017) mendefinisikan reklamasi sebagai usaha memperluas tanah (pertanian) dengan memanfaatkan daerah yang semula tidak berguna, misalnya dengan cara menguruh daerah rawa-rawa. Reklamasi diambil dari kata *reclamation*, yaitu pekerjaan memperoleh tanah, memitigasi, memelihara, memperbaiki, memperbaiki, melestarikan. Jadi di sini reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau penatagunaan lahan yang terganggu sebagai akibat sesuatu kegiatan lapangan hasil tambang agar dapat berfungsi dan berdayaguna sesuai dengan peruntukannya.

Pada tahun 1998, setelah Soeharto diturunkan dari jabatannya sebagai presiden, rencana reklamasi Teluk Jakarta ini dipermasalahkan oleh berbagai pihak karena dinilai tak ramah lingkungan. Pada 2003, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) membuat Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor 14/2003 isinya, yaitu menilai rencana reklamasi dan revitalisasi Teluk Jakarta Utara tidak layak, dan sudah disahkan secara hukum (Saputra, 2016, para. 4 dan 5).

Menurut KLH pada “6 Alasan KLH Tolak Reklamasi Pantai Utara Jakarta” (2010, para. 1), reklamasi pantai yang sebagian besarnya adalah hutan bakau itu dinilai sebagai kawasan niaga berpotensi merugikan lingkungan di Indonesia, terutama Jakarta. Pembatalan rencana reklamasi

tersebut didorong oleh enam faktor, dimulai dari masalah AMDAL hingga adanya potensi membahayakan Jakarta. Kasus ini kembali lagi terangkat pada 28 Juli 2009 terkait pembatalan majelis kasasi atas putusan PTUN Jakarta dan PTTUN Jakarta.

Pada 24 Maret 2011, dengan segala macam pertentangan, akhirnya posisi awal dimenangkan oleh para pengembang. Kemudian majelis hakim membuat keputusan baru yang membuat para pengembang berbondong-bondong melaksanakan rencana reklamasi. Hal ini juga terjadi pada tahun 2012 saat era Gubernur Fauzi Bowo. Teluk Jakarta merupakan salah satu wilayah yang berpotensi memberikan keuntungan banyak, terlebih untuk orang-orang dengan bisnis properti dan wisata (Saputra, 2016, para. 8-10).

Beberapa bisnis yang kemungkinan besar bisa untung besar, antara lain wilayah wisata Ancol dan SeaWorld, ada pula bisnis properti seperti penjualan apartemen-apartemen di Pantai Indah Kapuk (PIK). Bisnis-bisnis properti ini melakukan iklan besar-besaran untuk mempromosikan ladang uang mereka di televisi atau media massa lainnya. Namun kasus rencana reklamasi ini sempat hilang dari pemberitaan media massa manapun. Lalu pada 2 April 2016 kasus ini mendadak kembali muncul ke permukaan ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga ada aliran suap dari pengusaha untuk memengaruhi kebijakan reklamasi. Dugaan ini terkait dengan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yaitu Raperda Zonasi wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Jakarta 2015-2035 dan

Raperda Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Teluk Jakarta Utara. KPK tengah menetapkan dua tersangka terkait aliran suap ini di antaranya adalah anggota DPRD DKI Jakarta M Sanusi dan Ariesman Widjaja, Presdir PT Agung Podomoro Land (Saputra, 2016, para.12).

Reklamasi Teluk Jakarta ini bisa dihentikan oleh pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Ilyas Asaad, Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengatakan, KLHK bisa masuk menghentikan proyek pembangunan jika ada terjadi pelanggaran serius. Ilyas juga menjelaskan bahwa tindakan melanggar hukum yang sebabkan pencemaran lingkungan hidup dan timbulkan keresahan masyarakat, tercantum dalam Pasal 73 UU Nomor 32 Tahun 2009 (Arumningtyas, 2016, para. 15).

Penolakan pemerintah pusat terhadap proyek Reklamasi Teluk Jakarta ini pernah terjadi pada awal 2000-an. Pada 2003, dijelaskan oleh Ilyas, Kementerian Lingkungan Hidup menolak Reklamasi Teluk Jakarta dengan beberapa pertimbangan, antara lain, reklamasi mengancam keragaman hayati, asal tanah reklamasi tak jelas (saat itu, pemerintah Jakarta tak bisa menjelaskan asal tanah dari mana). Lalu ada PLTU, bagaimana desain soal penanganan masalah air (tak ada jawaban dari mana asal air tawar), dan reklamasi bisa perluas banjir Jakarta. Kala itu, rencana reklamasi sepanjang 30 km x 1 km (Arumningtyas, 2016, para. 16).



Selain itu, menurut Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), menyebutkan ada 19 alasan mengapa reklamasi Teluk Jakarta harus dihentikan, di antaranya terkait dengan dampak terhadap lingkungan. Misalnya, reklamasi Teluk Jakarta bisa berdampak terhadap kota Jakarta yang kemungkinan besar bisa tenggelam, merusak lingkungan hidup, menghancurkan ekosistem sumber pasir urugan, menghancurkan ekosistem di Kepulauan Seribu, dan menghancurkan mangrove muara angke dan habitat satwa yang dilindungi (Ramadhani, 2016, para. 1-35).

Kemunculan kembali kasus reklamasi Teluk Jakarta ini membuat media-media massa di Indonesia gencar memberitakan. Selain ada unsur politiknya, pemberitaan tentang reklamasi Teluk Jakarta banyak diberitakan karena banyaknya penolakan dan perkiraan dampak buruk terhadap lingkungan jika reklamasi dilaksanakan.

Penolakan didominasi oleh penduduk yang mayoritas adalah nelayan. Berdasarkan data dari jurnal ilmiah berjudul *Kebijakan Selamatkan Teluk Jakarta*, terdapat 17.000 nelayan yang bermukim di teluk Jakarta Utara dan terancam mengalami penggusuran (Warsilah, dkk., 2017, h. 22). Selain para nelayan dan penduduk, penolakan juga dilakukan oleh beberapa pengamat lingkungan serta aktivis alam.

### 2.2.3.1. Reklamasi di Negara lain

Reklamasi juga terjadi di beberapa negara, seperti Singapura dan Dubai. Berikut di bawah ini contoh kasus dari pelaksanaan reklamasi di beberapa negara selain Indonesia.

#### 1. Singapura

Singapura menjadi salah satu negara kecil yang sukses melakukan proyek reklamasi. Pelaksanaan reklamasi di Singapura sudah berlangsung sejak 40 tahun silam. Reklamasi dicanangkan oleh Perdana Menteri pertama Lee Kuan Yew pada 1976. Proyek reklamasi di Singapura akan berakhir pada 2030 (Juniman, 2016, para. 1 dan 2).

Singapura memperluas wilayahnya hingga 710 km persegi dengan reklamasi. Singapura melakukan reklamasi sendiri bertujuan untuk menambah kawasan perumahan, industri, dan rekreasi (Ayuningtyas, 2016, para. 5 dan 6).

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), menilai kondisi geografis reklamasi di Singapura ini dianggap berbeda dengan Jakarta. Dari segi teknologi untuk mengerjakan reklamasi juga tergolong cukup canggih sehingga tidak menyebabkan dampak di negara tersebut (Juniman, 2016, para. 3).

## 2. Dubai

Selain Singapura, Uni Emirates Arab (UEA) juga melakukan reklamasi di negaranya. UEA melakukan reklamasi dengan tujuan untuk mengekspansi lahan pendapatan negara mereka. Selama ini UEA hanya bergantung pada pendapatan dari ekspor minyak. Pemerintah UEA menyadari bahwa mereka akan kehabisan sumber minyak di masa depan, maka dari itu, dimulailah reklamasi dan pembangunan besar-besaran di sektor pariwisata. Reklamasi pertama mereka diawali dengan membangun tiga pulau yang disebut The Palm Island. Dalam The Palm Island terdapat Palm Jumeirah, Palm Jebel Ali, dan Palm Deira. Reklamasi ini dilakukan di wilayah Dubai, UEA (Hidayat, 2016, para. 1 dan 2).

Pembangunan tiga pulau tersebut, ternyata memiliki fungsi masing-masing yang akan ditawarkan kepada turis luar negeri. Palm Jumeirah ini dirancang sebagai pusat hiburan kelas atas dengan fasilitas yang eksklusif, seperti hotel bintang lima, perumahan elite, rumah sakit, dan fasilitas mewah lainnya. Pembangunan pada Palm Jumeirah dimulai pada 2001 silam, dengan kontraktor pemerintah Dubai, yakni Nakheel Propertis (Hidayat, 2016, para. 3).

Pembangunan di Palm Jumeirah menggunakan 94 juta meter kubik pasir dan tujuh ton batu. The Palm Jumeirah juga dibangun dengan

metode pembangunan yang modern dan teknologi canggih. Dengan adanya Palm Jumeirah, ternyata berhasil meningkatkan kunjungan wisata ke UEA. Department of Tourism and Commerce Marketing (DTCM) Dubai, pada 2010 ada sekitar 8,3 juta turis yang berkunjung. Lalu terus meningkat tiap tahunnya (Hidayat, 2016, para. 4-6).

Namun dari banyaknya kesuksesan dari reklamasi ini, adapula dampak yang menjadi perhatian besar. Banyak negara mulai melakukan reklamasi dan berdampak pada ekosistem laut. Menurut Emma Johnston dari Universitas South Wales, berpendapat bahwa kita (manusia) seharusnya lebih memikirkan dampak dari ‘perluasan perkotaan di laut’ (Nogrady, 2016, para. 10).

Konstruksi kecil sekalipun di daerah pesisir dapat mengubah laut. Johnston dan koleganya memperkirakan garis pantai alami di beberapa muara di Australia, Amerika Serikat, dan Eropa telah mengalami modifikasi dengan struktur buatan lebih dari 50%. Hal itu menyebabkan kekacauan bagi organisme laut dan habitat mereka, merusak terumbu karang yang menjadi sumber makanan ikan dan melindungi garis pantai dari terjangan ombak kuat, dan menggoyang banyak ekosistem pesisir yang sangat berguna seperti dataran garam dan hutan bakau. Membangun di atas sedimen hasil pengerukan juga berisiko bagi para penghuni bangunan itu, karena strata tersebut tidak sestabil lapisan batu di darat. Sejauh ini muncul sejumlah laporan bahwa

kepulauan Palm Jumeirah di Dubai sebenarnya mengecil. Tanah reklamasi juga menimbulkan risiko di daerah-daerah yang rentan gempa bumi (Nogrady, 2016, para. 11-16).

#### **2.2.4. Hegemoni**

Hegemoni menurut Antonio Gramsci merupakan turunan dari material teori Marxist yang diterapkan dalam sebuah ideologi. Gramsci menekankan bahwa sosial di sini berada pada unsur “super struktur”, di mana ideologi memproduksi berbagai pencapaian berupa adanya institusi-institusi, yang sebenarnya merujuk pada makna kekuasaan. Berdasarkan pemikiran kritis, hegemoni terbentuk karena adanya *capitalist society*, atau kelompok dominan yang mengutamakan kehidupan berjalan berdasarkan kemajuan ekonomi. Fokus utamanya adalah bagaimana hegemoni membentuk struktur wewenang dan aturan mengenai lingkungan sekitar tidak berdasarkan pemahaman sebagai seorang *environmentalist*. Namun berdasarkan struktur dari kelas-kelas ekonomi dan proses produksi di sebuah industri (Lull, 1995, h. 33).

Peran hegemoni dapat dilihat dari dua unsur, yaitu berdasarkan sosial-kultural dan ideologi. Dua unsur tersebut memperlihatkan bahwa semua sistem yang berjalan di dunia ini terbentuk dan boleh digunakan oleh masyarakat. Semua sistem itu dibentuk oleh kelompok dominan atau suara terbanyak (Fontana, 1993, h. 140).

Menurut Benedetto Fontana (1993, h. 140), hegemoni digambarkan dalam bentuk intelektual dan moral kepemimpinan (*direzione*), dimana mampu mengajak dan

mengontrol masyarakat. Ideologi, budaya, filosofi, dan “organizers” atau intelektual dikategorikan sebagai unsur intrinsik di dalam teori hegemoni.

Fontana (1993, h. 141) menyimpulkan bahwa hegemoni dipahami sebagai kendaraan dimana kelompok sosial yang dominan membentuk sebuah sistem permanen sendiri yang hanya mengafiliasi kaum elit dan melegitimasi tatanan sosial yang berlaku—mencakup jaringan kompleks sebuah gagasan yang saling bertentangan.

Gramsci juga menegaskan:

*The supremacy of social group is manifested in two ways: as “domination” and as “intellectual and moral leadership.” A social group is dominant over those antagonistic groups it wants to “liquidate” or to subdue even with armed force, and it is leading with respect to those groups that are associated and allied with it (Fontana, 1993, p. 141).*

Pada penelitian ini, kelompok dominan yang ditunjuk adalah para pengembang yang berperan sebagai kelompok kapitalis. Para pengembang di sini memiliki latar belakang pebisnis yang melihat bahwa Teluk Jakarta menjadi sebuah kesempatan untuk mendapatkan banyak keuntungan finansial. Kemudian kelompok dominan tersebut menyingkirkan kelompok yang lemah—penduduk dan nelayan di Teluk Jakarta—dan tidak masuk ke dalam tatanan sosial mereka. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Gramsci (dalam Fontana, 1993, h. 141), dalam hegemoni, supermasi kelompok sosial hanya memiliki dua peran, yakni sebagai yang mendominasi dan sebagai moral kepemimpinan juga intelektual.

Hegemoni di masyarakat nyatanya tidak terbentuk dengan sendirinya. Terbentuknya hegemoni di masyarakat ternyata dibantu oleh media massa sebagai alat. Menurut Gramsci (1976, dalam Lull, 1995, h. 33), teori hegemoni ini sendiri

menggunakan media massa sebagai alat untuk memperlihatkan kekuatan, kesejahteraan, dan status (secara filosofi, kebudayaan, dan moralitas) kaum elit.

Media massa juga digunakan, dalam hegemoni, sebagai bentuk penguatan sistem yang sudah ada di masyarakat kemudian dimanfaatkan untuk menyerap aspek-aspek sosial dan realitas budaya (Lull, 1995, h. 34).

Oleh karena itu, menurut Gramsci, teori hegemoni ini berhubungan dengan realisasi ideologi terhadap sebuah budaya. Hegemoni mulai terbentuk sebagai budaya tersendiri di dalam struktur masyarakat dimana memaksa orang-orang menerima ideologi kelompok dominan sebagai realitas yang wajar. Hal tersebut terlepas dari segala pengalaman realitas dan kesadaran masyarakat (Lull, 1995, h. 34).

Hegemoni (Lull, 1995, h. 34), menyiratkan keinginan tulus masyarakat untuk mengikuti aturan-aturan dan hukum yang dibuat oleh kelompok dominan. Masyarakat percaya bahwa hal tersebut dapat membantu mencapai beberapa hal. Meskipun begitu, masyarakat juga tahu akan kebenarannya, bahwa tidak dapat tercapai di praktik kehidupan sehari-hari. Lull (1995, h. 34) menegaskan bahwa ini bisa dikatakan mengontrol, bukan memaksa (fisikal) atau memaksa (psikologikal).

#### **2.2.5. Dampak dari Pembangunan Berkelanjutan**

Dalam pembangunan berkelanjutan memiliki pencapaian tertentu. Menurut Sonny Keraf (2010, h. 192), yang ingin dicapai dengan pembangunan berkelanjutan adalah menggeser titik berat pembangunan dari hanya pembangunan ekonomi menjadi juga mencakup pembangunan sosial-budaya dan lingkungan hidup. Dengan kata lain,

yang ingin dicapai di sini adalah sebuah integrasi pembangunan sosial-budaya dan pembangunan lingkungan hidup ke dalam arus utama pembangunan nasional agar kedua aspek tersebut mendapat perhatian yang sama bobotnya dengan aspek ekonomi. Pembangunan aspek sosial-budaya dan lingkungan hidup tidak boleh dikorbankan demi dan atas nama pembangunan ekonomi.

Kritik yang ingin disampaikan adalah ada kekeliruan sangat fundamental dalam paradigma pembangunan yang selama ini berlaku, karena menganggap pembangunan ekonomi dengan sasaran utama pada pertumbuhan ekonomi sebagai satu-satunya yang paling utama dalam pembangunan nasional. Pencapaian dari kemajuan ekonomi selama ini telah membawa kerugian yang sangat mahal pada sisi sosial-budaya dan lingkungan hidup (Keraf, 2010, h. 193).

Berikut di bawah ini tiga dampak kelanjutan dari pembangunan berkelanjutan seperti proyek reklamasi (Keraf, 2010, h. 193-194).

1. Dampak kelanjutan pertama (Keraf, 2010, h. 193-194) adalah terjadi kemiskinan yang semakin mendalam di banyak negara sedang berkembang, tidak saja karena kekayaan sumber daya alamnya terkuras habis untuk membayar utang luar negerinya. Lebih dari itu, kemerosotan sumber daya alam itu membuat mereka semakin tidak mampu untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Tingkat pendidikan semakin rendah karena tidak mampu membayar untuk pendidikan yang lebih baik bagi anak-anaknya.



2. Dampak kelanjutan kedua (Keraf, 2010, h. 194) adalah timbul berbagai penyakit yang terkait langsung dengan mutu kehidupan yang semakin menurun di satu pihak dan dampak dari berbagai pencemaran lingkungan hidup di pihak lain.
3. Dampak kelanjutan ketiga (Keraf, 2010, h. 194) adalah kehancuran sumber daya alam dan keanekaragaman hayati membawa pengaruh langsung bagi kehancuran budaya masyarakat di sekitarnya yang sangat tergantung hidupnya dari keberadaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati tersebut. Akibatnya, cara berpikir dan cara hidup mereka dengan segala kekayaan budayanya juga terancam, bersama terancamnya eksistensi mereka oleh punahnya keanekaragaman hayati itu.

Pada penelitian ini, dampak pembangunan berkelanjutan yang dimaksud adalah dampak kelanjutan dari reklamasi Teluk Jakarta.

Permasalahan lingkungan hidup yang terjadi setelah adanya pembangunan menjadikan beberapa media, misalnya Mongabay.co.id menjadi salah satu media yang fokus membahas suatu peristiwa dari perspektif lingkungan hidup.

Selain itu, menurut Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), menyebutkan ada 19 alasan mengapa reklamasi Teluk Jakarta harus dihentikan, di antaranya terkait dengan dampak terhadap lingkungan. Misalnya, reklamasi Teluk Jakarta bisa berdampak terhadap kota Jakarta yang kemungkinan besar bisa tenggelam, merusak lingkungan hidup, menghancurkan ekosistem sumber pasir urugan, menghancurkan ekosistem di Kepulauan Seribu, dan menghancurkan mangrove muara angke dan habitat satwa yang dilindungi (Ramadhani, 2016, para. 1-35).

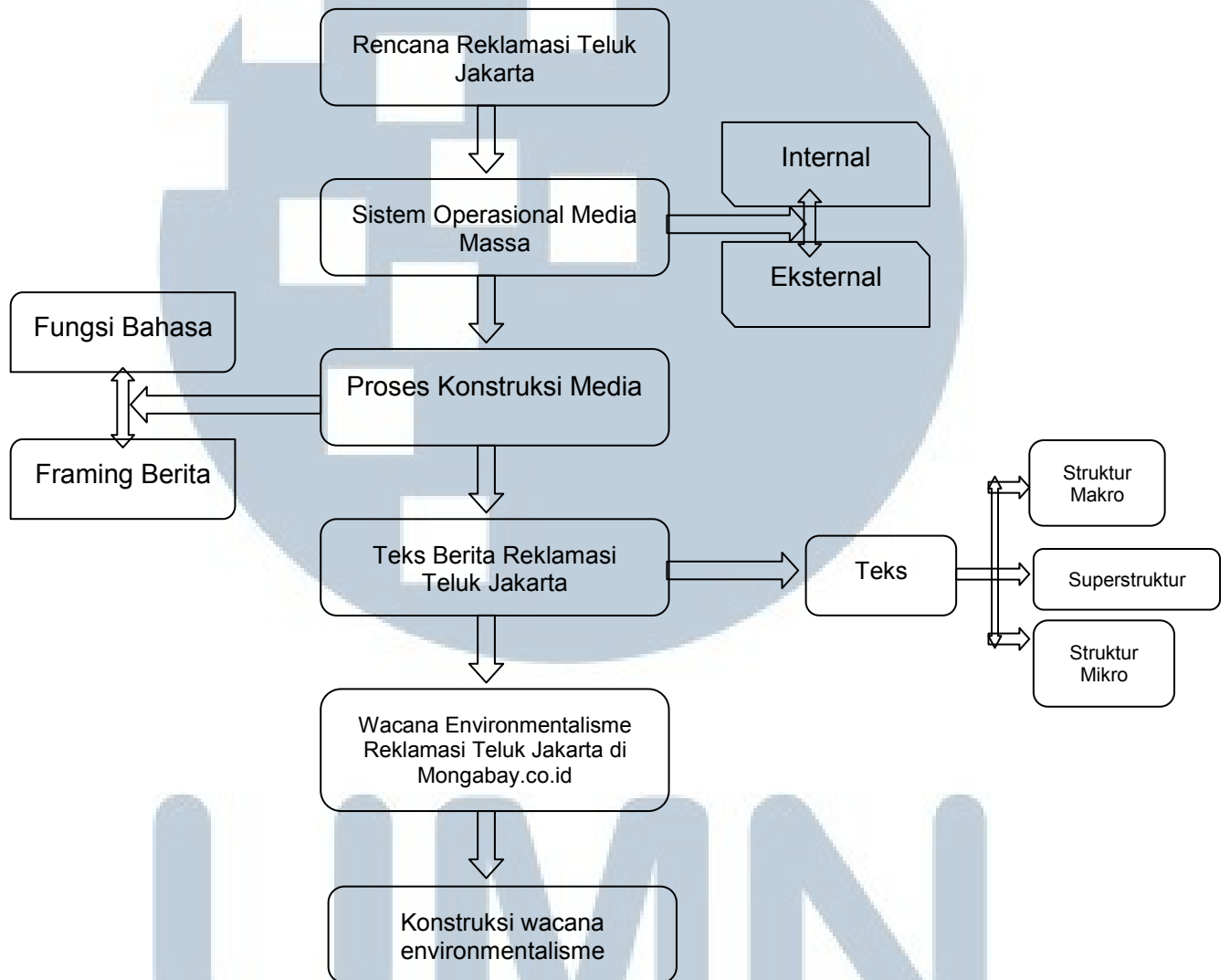
### 2.3. KERANGKA PEMIKIRAN

Pemikiran pada penelitian ini diawali dengan adanya penolakan reklamasi Teluk Jakarta dari berbagai pihak terkait dampak yang berkelanjutan. Dampak yang berkelanjutan itu dipotret di media-media massa, dalam hal penelitian ini, media Mongabay.co.id.

Penelitian ini juga datang dari pemikiran bahwa ada ketidaksetaraan dan kekuasaan yang dipotret oleh Mongabay.co.id pada peristiwa reklamasi Teluk Jakarta. Dengan demikian, pada penelitian ini, penulis ingin menggambarkan konstruksi berita tentang reklamasi Teluk Jakarta yang ada di Mongabay.co.id dan berfokus pada unsur jurnalisme lingkungan atau *environmental journalism*.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



UIN  
UNIVERSITAS  
MULTIMEDIA  
NUSANTARA